

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Objek Penelitian

Pekanbaru adalah ibu kota dan kota terbesar di Provinsi Riau. Berdasarkan penetapan Gubernur Sumatera di Medan No. 103 tanggal 17 Mei 1956, Kota Pekanbaru dijadikan Daerah Otonom yang disebut Harminte (Kota Baru) juga sebagai Praja Kota Pekanbaru (Pekanbaru.go.id, 2021). Kota Pekanbaru dapat menjadi pusat segitiga proses ekonomi di samping perkembangan seni dan budaya Melayu. Dengan menempatkan simpul segitiga strategis antara Indonesia, Singapura dan Malaysia, kota yang didirikan pada tahun 1784 ini telah menjadi kota modern di samping pusat perdagangan, jasa, pendidikan, dan pusat kebudayaan Melayu (Kompaspedia.kompas.id, 2021).

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pekanbaru pada tahun 2020, kota Pekanbaru memiliki penduduk sebanyak lebih dari 1,1 juta jiwa dengan 599.272 jiwa untuk jenis kelamin laki-laki dan 569.798 jiwa untuk jenis kelamin perempuan dengan pengelompok berdasarkan umur sebagai berikut (Tabel 1.1).

Tabel 1. 1 Jumlah penduduk Kota Pekanbaru menurut kelompok umur dan jenis kelamin tahun 2020

Kelompok Umur	Laki – Laki	Perempuan	Jumlah
0-4	58.623	53.540	112.163
5-9	52.792	48.994	101.786
10-14	48.292	44.506	92.798
15-19	54.340	55.514	109.854
20-24	63.573	61.489	125.062
25-29	55.196	52.831	108.027
30-34	50.678	48.471	99.149
35-39	46.746	45.678	92.424

(Bersambung)

(Sambungan)

Kelompok Umur	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
40-44	44.166	42.454	86.620
45-49	39.554	35.114	74.668
50-54	30.461	27.174	57.635
55-59	22.497	21.263	43.760
60-64	14.651	13.227	27.878
65-69	9.419	8.972	18.391
70-74	4.840	5.219	10.059
75-79	3.444	5.352	8.796
Jumlah/Total	599.272	569.798	1.169.070

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, 2021.

Menurut data Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, Kota Pekanbaru pada tahun 2020 tercatat memiliki sekitar 1.169.070 jiwa. Salah satu penduduk yang mendominasi di Kota Pekanbaru adalah penduduk dewasa muda yaitu 20 sampai 29 tahun dengan jumlah penduduk 233.089 jiwa. Wheelwright (2011) menyatakan bahwa dewasa muda adalah golongan masyarakat yang berada di antara umur 20 sampai 29 tahun. Penduduk usia muda merupakan penentu baik buruknya bangsa Indonesia di masa depan dan merupakan aset yang paling berharga dari suatu bangsa. Maka dari itu, penduduk usia muda perlu dibina, agar kemampuannya dapat memberikan kontribusi yang positif bagi pembangunan nasional (republika.co.id, 2019). Salah satunya yaitu dengan memiliki pengetahuan tentang keuangan. Penduduk dewasa muda di Kota Pekanbaru diharapkan memiliki kecerdasan finansial yang baik, sehingga dapat meningkatkan perekonomian negara atau meningkatkan kesejahteraan setiap individu dan keluarga di masa yang akan datang.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Kota Pekanbaru merupakan ibu kota dan kota metropolitan terbesar di Provinsi Riau, dengan jumlah penduduk pada tahun 2020 sebanyak 1.169.070 jiwa

(Pekanbarukota.bps.go.id, 2021). Seiring dengan pesatnya peningkatan pertumbuhan perekonomian di Indonesia, Kota Pekanbaru juga merupakan salah satu daerah yang dijadikan sebagai pusat jual beli di Sumatera dengan tujuan mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan kenaikan taraf hidup seseorang. Tujuan dari pertumbuhan ekonomi ini adalah untuk mencapai tingkat kemakmuran yang lebih tinggi. Faktor yang paling penting untuk keberhasilan suatu negara dalam jangka panjang adalah dengan meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam pertumbuhan perekonomiannya.

Badan Pusat Statistik Provinsi Riau mengatakan, pada akhir tahun 2020, pertumbuhan ekonomi daerah itu menurun hingga 1,12%. Sedangkan untuk sektor keempat tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Riau menurun 1,47%. Fluktuasi pertumbuhan ekonomi Kota Pekanbaru saling terkait dengan situasi peningkatan keuangan Kabupaten sekitarnya. Terjadinya penurunan aktifitas perekonomian di Kabupaten yang secara bersamaan berdekatan dengan Kota Pekanbaru. Hal ini dapat mempengaruhi dan menjadi cerminan bagi kondisi perekonomian Kota Pekanbaru. Ini disebabkan oleh sentra perdagangan di Provinsi Riau yang berada di Kota Pekanbaru. Salah satu alasan pertumbuhan ekonomi adalah jumlah penduduk yang selalu bertambah. Masalah penduduk tidak terlepas dari masalah ketenagakerjaan. Dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi maka penyediaan tenaga kerja akan tinggi pula. Pada tahun 2020, jumlah angkatan kerja di Kota Pekanbaru dari data hasil olah Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus adalah sebanyak 555.138 jiwa, yang terdiri dari 342.012 laki-laki dan 213.126 perempuan. Dari angkatan kerja tersebut ada sebanyak 507.617 penduduk yang bekerja, sedangkan sisanya adalah penduduk yang tidak bekerja atau menganggur (Pekanbarukota.bps.go.id, 2021).



Gambar 1. 1 Persentase Penduduk Miskin di Kota Pekanbaru

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, 2021

Berdasarkan gambar 1.1 persentase penduduk miskin di Kota Pekanbaru pada tahun 2013 mencapai 3,27 persen. Pada tahun 2014 terjadi penurunan menjadi 3,17 persen. Pada tahun 2015 kembali mengalami peningkatan mencapai 3,27 persen. Adapun pada tahun 2016 mengalami penurunan secara terus menerus sampai dengan tahun 2019 dan tahun 2020 kembali meningkat mencapai 2,62 persen.

Data hasil olah Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus, jumlah penduduk yang tidak bekerja atau menganggur di Kota Pekanbaru adalah sebanyak 47.521. Penduduk yang tidak bekerja atau menganggur dapat dikatakan sebagai penduduk miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang mengalami kekurangan uang untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok dan non pangan yang diukur dari segi pengeluaran atau penduduk yang memiliki rata-rata bulanan dengan pengeluaran per kapita di bawah garis kemiskinan (Ppukab.bps.go.id, 2021). Secara teori, ini berarti bahwa orang yang tidak menganggur memiliki pekerjaan dan penghasilan, penghasilan yang mereka terima dari pekerjaan harus memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jika kebutuhan hidup tidak terpenuhi, penduduk akan menjadi miskin. Dengan kata lain, tingkat pengangguran yang rendah (kesempatan kerja tinggi) akan berpengaruh pada tingkat kemiskinan yang rendah juga (Susiatur, 2018).

Peningkatan jumlah penduduk miskin ini terjadi akibat pandemi Covid-19 yang mengakibatkan banyak kegiatan perekonomian tidak berjalan seperti biasa, sehingga pendapatan masyarakat pun tertekan dan kebutuhan hidup tidak terpenuhi (Fadhli et al., 2021). Covid 19 berdampak kritis terhadap ketenagakerjaan dan kesejahteraan. Setidaknya ada 29,12 juta orang Penduduk Usia Kerja (PUK) yang menghambat penyebaran Covid 19, yang mendorong peningkatan menjadi 1,62 juta orang pengangguran. Selain itu, pandemi Covid-19 telah berdampak pada pertumbuhan 0,6 persen kemiskinan menjadi 9,8 juta orang pada tahun 2020 (Kemenkopmk.go.id, 2021).

Berdasarkan permasalahan tersebut, masyarakat dihadapkan dengan berbagai macam hal yang harus dihadapi seperti ancaman kehilangan pekerjaan, karena pembatasan sosial yang diterapkan pemerintah membuat perekonomian tidak beroperasi 100% dari kapasitas optimalnya, penyakit yang melemah karena semakin banyaknya populasi yang terinfeksi Covid-19, cedera dan angsuran kredit, ataupun memburuknya kondisi ekonomi akibat pandemi Covid-19 yang mengganggu stabilitas keuangan. Dengan keadaan pandemi ini, masyarakat harus bertahan dalam mengikuti kemajuan teknologi dan gaya hidup yang semakin tinggi. Adanya gaya hidup masyarakat yang merupakan bagian dari kehidupan sosial sehari-hari menjadi *trend* yang semakin berubah ke arah suatu keniscayaan dan menjadi hal penting dalam membentuk pola budaya konsumtif (Larasati et al., 2021). Dorongan untuk tetap menjalani gaya hidup konsumtif didorong oleh berbagai faktor yang terdiri dari manfaat transaksi dan gaya hidup yang diterapkan, hal ini dari waktu ke waktu membuat seseorang menjadi tidak rasional dalam membelanjakan uangnya.

Selain itu, jarak yang didukung melalui berbagai bentuk kemudahan dan fasilitas yang dilengkapi untuk menarik perhatian pelanggan untuk membeli barang dan jasa yang ditawarkan, tentunya termasuk salah satunya dalam hal pusat transaksi dalam pembayaran. Seperti saat ini, seseorang dapat dengan mudah melakukan pembelian tanpa harus mempunyai uang atau tabungan dengan cara menggunakan kartu kredit dalam transaksi pembayaran. Dalam penggunaan kartu kredit ini sebenarnya dapat menimbulkan berbagai masalah karena tidak mampu

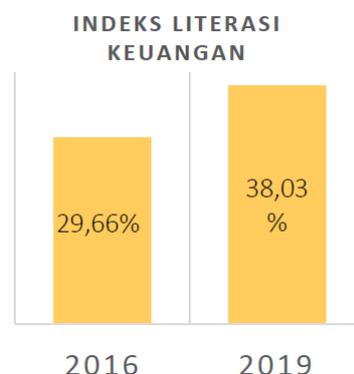
membayar tagihannya. Kartu kredit membuat perilaku hidup konsumtif dengan menggunakan pembelian secara berlebihan bahkan untuk hal-hal yang tidak terlalu dibutuhkan, untuk itu pembelian dengan kartu kredit membutuhkan dedikasi dan kemauan yang kuat dan pelanggan perlu memperhatikan jumlah kartu kredit, hutang yang ditanggung setelahnya (finansialku.com, 2019).

Perilaku konsumtif juga dapat berdampak buruk bagi masyarakat dewasa muda, seperti gaya hidup hedonis menunjukkan hasil perilaku konsumtif yang dapat menimbulkan masalah keuangan. Pendapatan atau uang saku anak muda hanya dapat digunakan untuk membeli bahan makanan, pakaian, alat elektronik, kegiatan rekreasi, menonton film, dan kebiasaan konsumtif lainnya. Fenomena ini seharusnya muncul sebagai karakteristik ketika pengeluaran anak muda terus menerus melebihi kemampuan mereka (moneysmart. Id, 2019). Selain itu, perilaku konsumtif disebabkan karena kemudahan akses untuk pemenuhan kebutuhan saat ini. Masyarakat usia dewasa muda yang sudah lekat dengan penggunaan internet telah menikmati berbagai fasilitas dari kecanggihan teknologi saat ini termasuk di bidang keuangan serta dengan adanya sarana internet maka semakin mudah bagi masyarakat usia muda untuk berbelanja dengan tetap melalui sosial media atau berbelanja *online* secara praktis tanpa harus bepergian.

Melihat fenomena yang terjadi saat ini, dibutuhkan generasi muda yang memiliki karakter kuat dan mampu memiliki pemikiran jangka panjang untuk masa depan sehingga dapat bertahan di era digital saat ini, pola pikir ini mampu mengatur diri sendiri dan peduli terhadap perencanaan keuangan yang diinginkan sebagai cara untuk menyelamatkan diri dari perilaku konsumtif dan merugikan diri sendiri di masa depan (Damayanti et al., 2019). Menurut Damayanti selaku Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia menyatakan bahwa perilaku konsumtif yang tinggi cenderung dimiliki oleh generasi muda atau milenial di Indonesia yang dimana lebih cenderung melakukan *spending* daripada menabung untuk kebutuhan masa depan (Cnnindonesia.com, 2019). Apalagi dalam kondisi keuangan yang terbatas, kalangan dewasa muda harus menghadapi biaya hidup yang juga meningkat. Dikutip dari finance.detik.com (2017), masyarakat usia muda masih menganggap hal yang berkaitan dengan keuangan yang kurang penting dan sudah

tidak mampu lagi menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak penting, sehingga dapat dikatakan bahwa perilaku pengendalian keuangan masih sangat rendah.

Kondisi ini harus didukung oleh pengetahuan masyarakat tentang *financial literacy*. *Organization for Economic Cooperation and Development* atau (OECD, 2017) mendefinisikan *financial literacy* sebagai pemahaman dan informasi tentang ide dan risiko keuangan, yang terdiri dari keterampilan, motivasi dan kepercayaan diri yang diperlukan untuk penggunaan pemahaman dan informasi yang diperoleh sebagai sarana untuk pengambilan keputusan, memastikan keuangan yang kuat dan meningkatkan kesejahteraan keuangan (*financial well-being*) individu dan masyarakat. Pengetahuan keuangan yang dimiliki seseorang dikembangkan sebagai kemampuan keuangan, dimana kemampuan keuangan itu sendiri digambarkan dengan kemampuan untuk menggunakan pengetahuan keuangan yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari (Palameta et al., 2016). Sedangkan *financial literacy* yang buruk menyebabkan seseorang memiliki pendapat yang salah dan membuat keputusan yang salah tentang pengetahuan dasar, *saving and borrowing* serta investasi (Chen dan Volpe, 1998). Dengan pengelolaan keuangan yang didukung oleh *financial literacy* yang tepat dan baik, maka taraf kehidupan seseorang diharapkan dapat meningkat yang dimana berlaku untuk setiap tingkat penghasilan, karena tanpa pengelolaan yang tepat, keamanan finansial akan sulit dicapai walaupun dengan tingkat penghasilan seseorang yang tinggi.



Gambar 1. 2 Indeks Literasi Keuangan di Indonesia Tahun 2016 dan 2019

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2020

Hasil survey Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2019 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan *financial literacy* di Indonesia pada tahun 2019 apabila dibandingkan dengan sebelumnya, yaitu mencapai 38,03 persen yang berarti masyarakat Indonesia yang memiliki pengetahuan mengenai produk-produk industri keuangan dengan kategori *well literate* yakni memiliki pengetahuan dan keyakinan mengenai hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam lembaga jasa keuangan dan memiliki keterampilan dalam menggunakan barang dan jasa keuangan. Angka tersebut meningkat jika dibandingkan dengan hasil survei OJK 2016 yang mencapai 29,7 persen. Dengan demikian dalam 3 tahun terakhir terdapat peningkatan pemahaman keuangan (literasi) masyarakat tentang hak, kewajiban, biaya dan resiko, serta manfaat dari produk dan layanan keuangan sebesar 8,33% (ojk.go.id,2019). Meskipun tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia mengalami peningkatan, namun untuk kawasan regional Asia Tenggara, Indonesia tertinggal jika dibandingkan dengan Malaysia yang memiliki indeks literasi keuangan di level 66%, Thailand 73% dan Singapura di level 98% (Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia Revisit 2017, Otoritas Jasa Keuangan).

Berdasarkan data indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia pada tahun 2019 dari hasil survei OJK menunjukkan Provinsi Riau memiliki indeks 43,19% berada di atas nilai rata-rata indeks literasi keuangan nasional. Namun, tidak banyak Provinsi yang memiliki indeks literasi keuangan yang cukup tinggi dan di atas rata-rata. Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya bersama untuk mendorong seluruh provinsi di Indonesia memiliki indeks literasi keuangan yang tinggi (*high literacy*) (Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia Revisit 2017, Otoritas Jasa Keuangan). Artinya masyarakat Riau juga harus didorong untuk lebih mengetahui pengetahuan keuangan serta menggunakan transaksi keuangan agar tidak timbulnya perilaku konsumtif.

Perilaku konsumtif yang tidak diimbangi oleh *financial literacy* dapat menyebabkan tingkat stress keuangan (Garman et al., 1996). Tekanan ekonomi yang meningkat pada akhirnya akan mengakibatkan kesulitan ekonomi (Kim et al., 2006). Meningkatnya stres karena kurangnya pemahaman tentang bagaimana

mengelola keuangan (*financial literacy*) menyebabkan *financial distress* (Kim et al., 2006). *Financial distress* didefinisikan sebagai situasi keuangan yang memburuk yang terjadi sebelum kebangkrutan atau likuidasi keuangan (Platt & Platt, 2002). Dengan menerapkan *financial literacy* yang baik dalam mengelola keuangan maka akan terhindar dari stress keuangan (Parcia & Estimmo, 2017).

Meskipun demikian, *financial distress* yang dihadapi oleh sebagian masyarakat bukanlah paling efektif karena ketidakmampuan ekonomi atau tingkat rendah keuntungan, tingkat keuntungan seseorang yang berlebihan juga tidak dapat menjamin keberadaan laki-laki atau perempuan bisa makmur, karena tanpa kendali keamanan keuangan, keamanan keuangan pada kenyataannya akan sulit dicapai, kesalahan dalam pengendalian keuangan bersama dengan penyalahgunaan kredit, dan tidak adanya rencana pembuatan keuangan yang menjadi alasan manusia pada umumnya cenderung konsumtif dan dapat memacu pemborosan (Krishna et al., 2010). Menurut Stamp (2009) *financial distress* juga muncul dari kurangnya tanggung jawab pribadi atas sikap buruk terhadap penanganan tagihan faktur dan kurangnya kesungguhan dalam membayar hutang. Akan tetapi, *financial distress* yang dihadapi masyarakat tidak semata-mata disebabkan oleh ketidakcukupan finansial atau tingkat keuntungan finansial yang rendah, tingkat pendapatan seseorang yang tinggi juga tidak dapat menjamin kehidupan individu yang sejahtera, karena tanpa pengelolaan keuangan yang baik, keamanan finansial pasti akan berkurang dan sulit untuk disadari (Krishna et al., 2010).

Penelitian yang dilakukan oleh Idris et al. (2013) tentang hubungan antara *financial literacy* dan *financial distress* pada dewasa muda di Malaysia berakhir pada studi bahwa, terdapat hubungan positif yang rentan di antara *financial literacy* dan *financial distress*. Jika responden memiliki tingkat *financial literacy* berlebihan, maka mereka dapat mengalami tahap *financial distress* yang lebih baik. Temuan menunjukkan bahwa hanya beberapa responden yang memiliki tahap *financial distress* yang berlebihan. Ini bisa jadi karena efektivitas inisiatif otoritas Malaysia untuk mengatasi dampak pertumbuhan biaya hidup, khususnya di daerah kota.

Berdasarkan fakta-fakta di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang hubungan antara *financial literacy* dan *financial distress* pada dewasa manusia muda di Kota Pekanbaru karena penulis berharap bahwa penelitian ini akan membawa dampak yang lebih baik lagi pada masyarakat dewasa muda di Kota Pekanbaru untuk menaruh perhatian lebih pada keuangan sehingga tidak mengalami kesulitan keuangan, karena *financial literacy* memiliki peran yang sangat penting dalam mengetahui tingkat kesejahteraan seseorang dan rumah tangga di masa mendatang serta mendukung remaja dalam mengontrol dan membuat pilihan tentang keuangan mereka.

1.3 Perumusan Masalah

Pertumbuhan ekonomi di Kota Pekanbaru secara keseluruhan tahun, mengalami kontraksi atau penurunan. Kontraksi tersebut terjadi akibat pandemi Covid-19 yang menyebabkan banyak kegiatan perekonomian tidak berjalan seperti biasa, sehingga pendapatan masyarakat pun tertekan dan kebutuhan hidup tidak terpenuhi. Kemenko PMK menyatakan bahwa Covid 19 berdampak serius terhadap ketenagakerjaan dan kesejahteraan. Dari sisi penggunaan, kontraksi terutama bersumber dari penurunan konsumsi RT, konsumsi pemerintah, dan PMTB (Laporan Perekonomian Provinsi Maret 2021, BI). Dengan keadaan pandemi ini, masyarakat harus bertahan dalam mengikuti kemajuan teknologi dan gaya hidup yang semakin tinggi. Adanya gaya hidup masyarakat yang merupakan bagian dari kehidupan sosial sehari-hari menjadi trend yang semakin berubah ke arah suatu keniscayaan dan menjadi hal penting dalam membentuk pola budaya konsumtif (Larasati et al., 2020). Perilaku konsumtif juga dapat berdampak buruk bagi masyarakat dewasa muda, seperti gaya hidup hedonis menunjukkan hasil perilaku konsumtif yang dapat menimbulkan masalah keuangan. Perilaku konsumtif yang tidak diimbangi dengan *financial literacy* dapat memicu tingkat stress keuangan (Garman et al., 1996). Tingkat stress yang semakin meningkat karena kurangnya pemahaman untuk mengelola keuangan (*financial literacy*) akan menyebabkan adanya *financial distress* (Kim et al., 2006).

Penelitian (Idris et al., 2013) menemukan terdapat hubungan positif yang rentan di antara *financial literacy* dan *financial distress*. Pada penelitian tersebut ditemukan bahwa responden memiliki tahap *financial literacy* berlebihan, maka mereka dapat menikmati tingkat *financial distress* yang lebih tinggi pula. Beberapa studi terdahulu yang terkait dengan masalah *financial literacy* dan *financial distress* tidak menjadikan Kota Pekanbaru sebagai studi kasus. Dikarenakan perbedaan faktor-faktor pada demografi dan geografi tersebut maka studi kasus untuk masalah tersebut di Kota Pekanbaru perlu untuk diteliti.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan pada sebelumnya maka dapat disimpulkan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat *financial literacy* pada dewasa muda di Kota Pekanbaru?
2. Bagaimana tingkat *financial distress* pada dewasa muda di Kota Pekanbaru?
3. Apakah terdapat hubungan antara *financial literacy* dan *financial distress* pada dewasa muda di Kota Pekanbaru?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis tingkat *financial literacy* pada dewasa muda di Kota Pekanbaru.
2. Untuk menganalisis tingkat *financial distress* pada dewasa muda di Kota Pekanbaru.
3. Untuk menganalisis hubungan antara *financial literacy* dan *financial distress* pada dewasa muda di Kota Pekanbaru.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Aspek Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan gagasan bagi perkembangan keilmuan di bidang ilmu *financial behavior* khususnya mengenai *financial literacy* dan *financial distress* dikalangan anak muda di Kota

Pekanbaru. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.5.2 Aspek Praktis

a. Untuk Otoritas Jasa Keuangan

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan *financial literacy* dan menekan *financial distress* pada dewasa muda Kota Pekanbaru mengenai penyuluhan produk dan pelayanan keuangan.

b. Untuk Masyarakat Kota Pekanbaru

Penelitian ini diharapkan dapat membantu penduduk Kota Pekanbaru dalam memiliki *financial literacy* yang lebih baik di masa depan dan mengurangi tingkat *financial distress*.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Berisi tentang sistematika dan penjelasan ringkas laporan penelitian yang terdiri dari Bab I sampai Bab V dalam laporan penelitian.

a. **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan penjelasan secara umum, ringkas dan padat mengenai isi bab penelitian yang meliputi: Gambaran Umum Objek Penelitian, Latar Belakang Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian serta Sistematika Penulisan Penelitian.

b. **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisikan penjelasan dari literature penelitian yang berkaitan dengan teori penelitian yang mendukung solusi permasalahan, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran.

c. **BAB III: METODE PENELITIAN**

Bab ini memaparkan metode dan teknik penelitian yang meliputi jenis penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis temuan yang dapat menjawab masalah penelitian yang berisi uraian variabel, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, metode pengumpulan data dan teknik analisis data.

d. BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang analisis data yang menitik beratkan pada hasil olahan data sesuai dengan metode yang digunakan. Interpretasi hasil analisis dari objek penelitian sesuai dengan uji statistik yang digunakan.

e. BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan kesimpulan dari analisis dan pembahasan dari bab–bab sebelumnya dan saran yang dapat diterapkan oleh masyarakat yang menjadi objek penelitian dan juga regulator dalam hal peningkatan pemahaman keuangan bagi masyarakat Kota Pekanbaru.

Halaman ini sengaja dikosongkan